

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Diamastuti, dkk. 2001. Dampak Reformasi Pajak dan Retribusi Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pemda Tingkat II Kabupaten Cianjur, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol.02, No.2. Agustus: 55-74.
- Dyckman, Thomas R., Roland E. Dukes, dan Charles J. Davis. 2000. *Akuntansi Intermediate*, Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, Sugeng. 2002. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 05, No.01.
- Jaya, W.K., Baswir, R., Bastian, I., 2000. *Kajian Profil Daerah Tingkat II Ditinjau dari Prospek Potensi Penerimaan Daerah*, Laporan Akhir, Kerja sama Dirjen Pembangunan Daerah DEP DAGRI dengan PAU, Studi Ekonomi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
- Nasution, S. Makmur. 2001. *BATAM: Jangan Sampai Arang Habis Besi Binasa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah, Pemerintah Daerah Kota Batam.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.*
- Supramono. 2003. Posisi Pajak dan Retribusi Sebagai Sumber Penerimaan Daerah di Kota Semarang, *Jurnal Studi Pembangunan*, Vol.XV, No.1. April: 37-54.

- Tubagus Chairul Amachi Zandjani. 1992. *Perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo & Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Salemba Empat.
- Yop Pandie. 1992. *Peranan Guru Dalam Memasyarakatkan Pajak*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten / Kota di Propinsi Riau.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*